



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

5. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1444, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3876);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

#### Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas :
  - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);
  - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 51.106.703.130.810,00 (lima puluh satu triliun seratus enam miliar tujuh ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Penerimaan ...

- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 102.394.445.611.426,00 (seratus dua triliun tiga ratus sembilanpuluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 41.368.337.491.227,00 (empat puluh satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.279.670.290.761,00 (empat belas triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

## Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 136.086.962.052.249,00 (seratus tiga puluh enam triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor :

01	Sektor industri	Rp	76.077.102.723,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan	Rp	617.303.021.068,00
03	Sektor pengairan	Rp	34.303.170.112,00
04	Sektor tenaga kerja	Rp	300.369.935.110,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi	Rp	97.632.233.574.009,00
06	Sektor transportasi, meteorologi & geofisika	Rp	352.116.922,434,00
07	Sektor pertambangan dan energi	Rp	313.388.078.059,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi	Rp	95.251.604.982,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi	Rp 13.125.636.564.808,00
		10 Sektor lingkungan ...
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Rp 244.951.699.001,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	Rp 5.445.119.974.109,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp 349.059.261.076,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja	Rp 712.274.145.060,00
14.	Sektor perumahan dan permukiman	Rp 17.900.291.191,00
15.	Sektor agama	Rp 1.386.529.922.673,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp 389.497.636.561,00
17.	Sektor hukum	Rp 759.927.712.000,00
18.	Sektor aparatur negara dan pengawasan	Rp 4.069.534.341.661,00
19.	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi & media massa	Rp 1.991.373.430.612,00
20.	Sektor pertahanan dan keamanan	Rp 8.174.113.665.000,00
b.	Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 66.628.839.579.744,00 (enam puluh enam triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dirinci menurut sektor :	
01	Sektor industri	Rp 197.420.191.572,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan	Rp 4.757.826.140.539,00
03	Sektor pengairan	Rp 3.574.815.051.629,00
04	Sektor tenaga kerja	Rp 1.164.861.725.741,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi	Rp 9.928.676.605.013,00
06	Sektor transportasi,	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	meteorologi & geofisika	Rp 6.942.861.026.269,00
07	Sektor pertambangan dan energi	Rp 7.845.417.576.713,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi	Rp 1.820.770.321.597,00
		09 Sektor ...
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi	Rp 10.611.599.067.497,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Rp 761.395.433.094,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	Rp 6.726.083.220.155,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp 598.436.962.149,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja	Rp 3.790.007.930.016,00
14.	Sektor perumahan dan permukiman	Rp 2.006.852.164.771,00
15.	Sektor agama	Rp 396.577.233.047,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp 762.755.810.658,00
17.	Sektor hukum	Rp 136.259.859.865,00
18.	Sektor aparaturnegara dan pengawasan	Rp 1.292.386.475.688,00
19.	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi & media massa	Rp 423.272.284.718,00
20.	Sektor pertahanan dan keamanan	Rp 2.890.564.499.013,00

- (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

### Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2000  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

#### UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp 6.317.742.480.989,00 (enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi sebesar Rp 12.751.097.373.220,00 (dua belas triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

Sehubungan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sehubungan dengan koreksi/kontra pos Perhitungan Anggaran Negara (PAN) mengenai penerimaan bantuan program telah sesuai dengan Standar Akuntansi dan tidak bertentangan dengan Sistim Dasar Kas (Cash Basis).

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

###### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas

###### Huruf b

Penerimaan pembangunan tersebut terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.

###### Ayat (2)

Cukup jelas

###### Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :

#### RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Penerimaan perpajakan	Rp 102.394.445.611.426,00
0110 Pajak penghasilan (PPh)	Rp 55.944.265.167.579,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp 27.803.179.194.657,00
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)	Rp 3.565.279.217.833,00
0210 Bea masuk	Rp 2.305.613.687.614,00
0220 Cukai	Rp 7.732.942.664.594,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor	Rp 4.630.150.818.856,00
0240 Bea meterai	Rp 413.014.860.293,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	Rp 41.368.337.491.227,00
0310 Penerimaan minyak bumi	Rp 25.957.441.440.987,00
0320 Penerimaan gas alam	Rp 15.410.896.050.240,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penerimaan ...

Penerimaan negara bukan pajak	Rp	14.279.670.290.761,00
0410 Pendapatan pendidikan	Rp	71.366.158.941,00
0411 Uang pendidikan	Rp	66.361.409.433,00
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	3.634.258.261,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya	Rp	1.370.491.247,00
0480 Pendapatan pendidikan swadana	Rp	530.353.954.568,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana	Rp	530.353.954.568,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp	32.442.264.280,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	Rp	176.374.120,00
0512 Penjualan hasil peternakan	Rp	188.137.605,00
0513 Penjualan hasil perikanan	Rp	47.799.807,00
0514 Penjualan hasil sitaan	Rp	6.794.034.497,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	419.498.176,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	130.277.905,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	11.077.871.989,00
0519 Penjualan lainnya	Rp	13.608.270.181,00
0520 Penjualan aset tetap	Rp	31.230.295.445,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	Rp	3.911.707.230,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor	Rp	1.769.031.169,00
0523 Penjualan sewa beli	Rp	21.901.698.067,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	Rp	3.647.858.979,00
0530 Pendapatan sewa	Rp	9.587.397.772,00
0531 Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	4.727.025.393,00
0532 Sewa Gedung, bangunan, gudang	Rp	2.487.143.879,00
0533 Sewa benda-benda bergerak	Rp	1.650.729.946,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp	722.498.554,00
0540 Pendapatan jasa I	Rp	693.451.832.019,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	17.070.596.802,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum	Rp	427.781.185,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	Rp	167.655.322.683,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	141.456.995.058,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	309.928.796.891,00
			0546 Pendapatan sensor, ...
0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	Rp	3.547.311.630,00
0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja	Rp	8.545.338.137,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	Rp	5.668.040.399,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp	39.151.649.234,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	948.467.661.242,00
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp	146.254.992.066,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	Rp	402.028.486.443,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	4.807.390.868,00
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	Rp	6.333.186.708,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat pajak	Rp	2.034.974.283,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	3.662.149.830,00
0557	Bea lelang	Rp	52.042.579.666,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	39.909.468.265,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	291.394.433.113,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	57.388.840.455,00
0561	Bea visa dan paspor	Rp	30.395.000,00
0562	Bea konsuler	Rp	--
0563	Bea maritim	Rp	--
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	Rp	--
0569	Penerimaan rutin luar negeri lainnya	Rp	57.358.445.455,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp	1.922.781.704.615,00
0581	Pendapatan penjualan swadana	Rp	6.544.280.377,00
0582	Pendapatan sewa swadana	Rp	1.232.663.671,00
0583	Pendapatan jasa swadana	Rp	1.915.004.760.567,00
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp	31.504.709.643,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	62.052.303,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	15.300.950,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	399.443.194,00
			0614 Hasil denda, ...
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp	14.976.903.609,00
0615	Ongkos perkara	Rp	1.229.404.419,00
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp	14.821.605.168,00
0710	Pendapatan dari investasi	Rp	6.263.902.109.063,00
0711	Bagian laba dari BUMN	Rp	3.428.262.277.194,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	Rp	2.835.639.831.869,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	147.157.184.645,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	28.092.152.205,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	6.533.807.340,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	50.028.025.827,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	46.442.739.671,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp	16.023.673.602,00
0816	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	36.750.000,00
0817	Pembetulan pembukuan bea masuk	Rp	36.000,00
0820	Pendapatan kembali tahun anggaran yang lalu	Rp	34.798.536.074,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	5.837.890.338,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	2.092.032.876,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	4.809.182.599,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	6.026.588.464,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp	16.026.357.260,00
0826	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	6.484.537,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	Rp	7.191.235.360,00
0881	Pendapatan lain-lain swadana	Rp	7.191.235.360,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

0890	Pendapatan lain-lain	Rp	3.498.046.406.639,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp	4.812.166.886,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	22.565.889.647,00
			0893 Penerimaan kembali, ...
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	5.702.588.689,00
0826	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	6.484.537,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	Rp	124.328.234.484,00
0895	Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	Rp	1.633.978.933.591,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	1.706.658.593.342,00
	JUMLAH		Rp 158.042.453.393.414,00

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

0910	Bantuan Program	Rp	24.925.721.020.599,00
0920	Bantuan Proyek	Rp	26.180.982.110.211,00
	JUMLAH	Rp	51.106.730.130.810,00

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

01 Sektor industri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

01.1	Subsektor Industri		Rp	76.077.102.723,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp		76.077.102.723,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan			
02.1	Subsektor Pertanian		Rp	207.945.019.540,00
02.2	Subsektor Kehutanan		Rp	409.358.001.528,00
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan		Rp	617.303.021.068,00
			03	Sektor Pengairan ...
03	Sektor Pengairan			
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air		Rp	14.890.733.552,00
03.2	Subsektor Irigasi		Rp	19.412.436.590,00
	Jumlah Sektor Pengairan		Rp	34.303.170.112,00
04	Sektor Tenaga Kerja			
04.1	Subsektor Tenaga Kerja		Rp	300.369.935.110,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja		Rp	300.369.935.110,00
05	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi			
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri		Rp	70.436.301.613,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri		Rp	48.249.634.033,00
05.4	Subsektor Keuangan		Rp	97.408.692.311.765,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil		Rp	104.855.326.598,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi		Rp	97.632.233.574.009,00
06	Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika			
06.1	Subsektor Prasarana Jalan		Rp	25.760.722.360,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat		Rp	27.787.001.981,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut		Rp	174.990.500.495,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara		Rp	61.899.041.715,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)		Rp	61.679.655.883,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika		Rp	352.116.922.434,00
07	Sektor Pertambangan dan Energi			
07.1	Subsektor Pertambangan		Rp	308.142.157.955,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

07.2	Subsektor Energi	Rp	5.245.920.104,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	313.388.078.059,00
08	Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi		
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	22.486.159.259,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	72.765.445.723,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	95.251.604.982,00
		09	Sektor Pembangunan ...
09	Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	13.047.354.872.501,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	78.281.692.307,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	13.125.636.564.808,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	9.492.872.682,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	235.458.826.319,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	244.951.699.001,00
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	4.951.274.837.578,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	383.475.564.149,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	100.561.144.359,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	9.808.428.023,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olah Raga	Rp	5.445.119.974.109,00
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	349.059.261.076,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	349.059.261.076,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

13	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	136.336.950.415,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	575.937.194.645,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	Rp	712.274.145.060,00
			14 Sektor Perumahan ...
14	Sektor Perumahan dan Permukiman		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	12.518.233.256,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	5.382.057.935,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	17.900.291.191,00
15	Sektor Agama		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	242.417.318.611,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	1.144.112.604.062,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp	1.386.529.922.673,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	238.752.519.572,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	37.610.961.991,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	2.483.783.381,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	110.650.371.617,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	289.497.636.561,00
17	Sektor Hukum		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	651.537.721.619,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	108.389.990.381,00
	Jumlah Sektor Hukum	Rp	759.927.712.000,00
18	Sektor Aparatur Negara dan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	Pengawasan		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	3.759.597.862.042,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	309.936.479.619,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	4.069.534.341.661,00
19	Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa		
19.1	Subsektor Politik	Rp	98.098.981.874,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	1.337.049.915.104,00
			19.3 Subsektor Penerangan, ...
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	556.224.533.634,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	1.991.373.430.612,00
20	Sektor Pertahanan dan Keamanan		
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Rp	8.174.113.665.000,00
20.3	Subsektor Pendukung		--
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	8.174.113.665.000,00
	JUMLAH	Rp	136.086.962.052.249,00

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

01	Sektor industri		
01.1	Subsektor Industri	Rp	165.450.355.086,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp	165.450.355.086,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	4.056.955.222.109,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	314.546.403.413,00
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp	4.371.501.625.522,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

03	Sektor Pengairan		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	283.023.101.687,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	988.802.263.345,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	1.271.825.365.032,00
04	Sektor tenaga Kerja		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	1.081.655.931.433,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp	1.081.655.931.433,00
05	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	15.358.190.987,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	48.104.863.791,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	330.740.717.702,00
	05.4 Subsektor ...		
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	8.390.620.645.512,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	190.754.481.336,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi	Rp	8.975.578.899.328,00
06	Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika		
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	2.783.373.136.654,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	279.197.948.713,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	155.682.512.114,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	123.465.727.730,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	15.232.188.450,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	Rp	3.356.951.513.661,00
07	Sektor Pertambangan dan Energi		
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	49.122.395.603,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	756.030.444.679,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	805.152.840.282,00
08	Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi		
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	46.832.494.988,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	6.890.474.890,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	53.722.969.878,00
09	Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	8.567.977.302.064,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	858.711.118.003,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	9.426.688.420.067,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	270.475.564.268,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	54.807.072.928,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	325.282.637.196,00
		11	Sektor Pendidikan, ...
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	4.250.189.511.182,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	175.291.322.946,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	73.677.855.748,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	68.206.408.142,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olah Raga	Rp	4.567.365.098.018,00
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	235.348.875.658,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	235.348.875.658,00
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	872.831.563.279,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.207.969.625.018,00
13.3	Subsektor Perananan Wanita, Anak		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

	dan Remaja	Rp	417.501.692.808,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	Rp	2.498.302.881.105,00
14	Sektor Perumahan dan Permukiman		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	801.531.424.346,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	9.119.074.051,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	810.650.498.397,00
15	Sektor Agama		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	26.852.522.982,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	236.149.594.849,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp	263.002.117.831,00
			16 Sektor Ilmu ...
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	129.654.632.625,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	53.175.041.011,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	67.705.196.232,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	62.681.778.215,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	28.088.176.657,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	92.340.508.153,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	433.645.332.893,00
17	Sektor Hukum		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	7.522.387.811,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	35.610.802.320,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	Rp	93.111.869.734,00
	Jumlah Sektor Hukum	Rp	136.245.059.865,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

18	Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	397.434.735.748,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	16.361.288.921,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	413.796.024.669,00
19	Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa		
19.1	Subsektor Politik	Rp	9.688.851.526,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	11.047.543.500,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	88.704.585.987,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	109.440.981.013,00
			20 Sektor Pertahanan ...
20	Sektor Pertahanan dan Keamanan		
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	Rp	2.585.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	Rp	884.249.446.449,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp	259.415.596.150,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	1.146.250.042.599,00
	JUMLAH	Rp	40.447.857.469.533,00

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN  
BANTUAN PROYEK/TEKNIS  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

01	Sektor industri		
01.1	Subsektor Industri	Rp	31.969.836.486,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp	31.969.836.486,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	370.003.487.092,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	16.321.027.925,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp	386.324.515.017,00	
03	Sektor Pengairan			
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	1.774.316.004.256,00	
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	528.673.682.341,00	
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	2.302.989.689.597,00	
04	Sektor Tenaga Kerja			
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	83.205.794.308,00	
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp	83.205.794.308,00	
05	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi			
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	1.972.000,00	
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	5.306.320.724,00	
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	--	
				05.4 Subsektor ...
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	885.441.083.586,00	
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	62.348.329.375,00	
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi	Rp	953.097.705.685,00	
06	Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika			
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.676.732.623.429,00	
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	837.778.301.885,00	
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	893.814.259.440,00	
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	150.464.322.580,00	
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	27.120.005.274,00	
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	Rp	3.585.909.512.608,00	
07	Sektor Pertambangan dan Energi			
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	--	
07.2	Subsektor Energi	Rp	7.040.264.736.431,00	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi		Rp 7.040.264.736.431,00
08	Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi		
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	--
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	1.767.047.351.719,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi		Rp 1.767.047.351.719,00
09	Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	1.162.242.110.021,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	22.668.537.409,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	1.184.910.647.430,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	300.148.681.806,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	135.594.114.092,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	436.112.795.898,00
		11	Sektor Pendidikan, ...
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.096.855.473.798,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	61.151.467.648,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	7.320.475,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	703.860.216,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olah Raga	Rp	2.158.718.122.137,00
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	363.088.086.491,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	363.088.086.491,00
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	133.834.235.359,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.157.855.813.552,00
13.3	Subsektor Perananan Wanita, Anak dan Remaja	Rp	15.000.000,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	Rp	1.291.705.048.911,00
14	Sektor Perumahan dan Permukiman		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	1.181.786.043.565,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	14.415.622.809,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	1.196.201.666.374,00
15	Sektor Agama		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	118.271.545,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	133.456.843.671,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp	133.575.115.216,00
			16 Sektor Ilmu ...
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	67.849.383.430,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	20.477.010.481,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	76.629.950.824,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	124.370.509.515,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	32.341.584.070,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	7.442.039.445,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	329.110.477.765,00
17	Sektor Hukum		







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp 209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp 202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Dalam Sisa Anggaran Lebih tersebut di atas termasuk jumlah koreksi BPK atas pengeluaran untuk subsidi pangan dan subsidi pupuk Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp 6.122.364.120.635,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang baru dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 1999/2000 setelah dilakukan audit oleh BPKP.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3990